

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta
- Agustino, 2008, *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Alwi, Hasan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*. Balai Pustaka. Jakarta
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, *Laporan Pelaksanaan Tugas Akhir Tahun 2017*
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, *Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2017-2021*
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Grasindo, Jakarta,
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1992, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*, Peradaban, Jakarta
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan, HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syarif, Amiroeddin, 1987, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.

Umar, Husein, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi kedua*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Widodo, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia, Malang, hlm. 98.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke 4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7)

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1)

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2009 Nomor 1 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2014 Nomor 2 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 Nomor 34)

Peraturan Bupati Sleman No. 24.1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2014 Nomor 14 Seri D)

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2016 Nomor 61)

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2016 Nomor 66)

Sumber Lain

Adhiguno, Lillo, 2018. *Peran Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Aulia, Rizky, 2017, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Iqbal, Muhammad, 2016, *Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman (Kajian Studi Melalui Peraturan Daerah 08 Tahun 2014)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Munthe, Susilawaty dkk, 2018, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6 (1) (2018): 38-52

Dikebut sejak 2014, Ini Capaian Pembangunan Infrastruktur Jokowi, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3585711/dikebut-sejak-014-ini-capaian-pembangunan-infrastruktur-jokowi>, diakses 21 April 2018

Peralihan Urusan Tata Ruang Dirjen Diharapkan Secepatnya Sudah In, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3831956/peralihan-urusan-tata-ruang-dirjen-diharapkan-secepatnya-sudah-in> (diakses 4 Juni 2018)

<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2167355-hubungan-hukum-dan-kebijakan-publik/#ixzz1qmszT9hG>. Diakses 23 April 2018.

<https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>, diakses 12 Desember 2018, pukul 23.45 wib

<https://uqm.ac.id/id/berita/1244bertentangan.dengan.peraturan.perundang-an.di.atasnya.perda.layak.dicabut>, diakses 12 Desember 2018, pukul 23.45 wib